



Forum Bisnis Indonesia-Jepang Hasilkan Nilai Dagang 23,6 Miliar Dolar AS

Iftar Ramadan di Istiqlal, Ketua Umum Kadin
Ajak Dunia Usaha Perkuat Ketahanan
Ekonomi dan Spiritual

Anindya Bakrie Ungkap Pemerintah dan
Dunia Usaha Siap Hadapi Investigasi USTR

Buka Puasa Bersama Ketum Kadin Provinsi,
Anindya Bakrie Bahas MBGnomics hingga
Tarif Impor AS

Kadin Lampung Gelar Dialog Ekonomi, Bahas
Peluang dan Tantangan Tahun 2026

Babak Baru Kolaborasi RI-Jepang

Oleh Anindya Novyan Bakrie

Saya ingin memulai dengan satu hal yang paling penting: nilai kolaborasi 23,63 miliar dolar AS atau setara Rp380–400 triliun yang kita capai di Tokyo akhir Maret 2026 itu adalah momentum besar. Tetapi bagi kami di Kadin, ini jelas bukan garis akhir, melainkan justru pintu masuk menuju kerja sama yang jauh lebih dalam dan lebih strategis. Angka ini mencerminkan kepercayaan, tetapi yang lebih penting adalah arah transformasi ekonomi yang sedang kita bangun bersama.

Nilai kerja sama yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Jepang melihat Indonesia sebagai mitra utama di kawasan.

Fakta ini juga memperlihatkan bahwa reformasi dan arah kebijakan ekonomi Indonesia mulai mendapat respons konkret dari investor global. Kami datang ke Tokyo dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama di bidang investasi, industri, perdagangan, dan teknologi.

Kadin hadir untuk memastikan dunia usaha langsung terhubung dengan peluang nyata, bukan hanya konsep di atas kertas. Kami ingin setiap agenda pemerintah bisa langsung ditransformasikan menjadi kerja sama bisnis.

Kami mendampingi Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri ekonomi. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha ini menurut saya menjadi kunci keberhasilan diplomasi ekonomi. Investor melihat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak sebagai satu kesatuan. Selama di Tokyo, kami aktif bertemu dengan berbagai mitra strategis Jepang, mulai dari Keidanren, JETRO, hingga Japan Chamber of Commerce and Industry. Kami juga berdialog langsung dengan sejumlah perusahaan besar Jepang di sektor energi, manufaktur, dan teknologi. Interaksi ini membuka ruang komunikasi yang jauh lebih konkret dan langsung.

Respons pengusaha Jepang sangat positif. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki potensi jangka panjang. Bahkan, mereka menilai Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi paling menjanjikan di Asia saat ini. Beberapa di antara mereka menyampaikan minat untuk meningkatkan investasi secara signifikan. Tidak hanya ekspansi bisnis, tetapi juga relokasi sebagian rantai produksi ke Indonesia. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk memperkuat posisi dalam global supply chain.

Kami membahas secara mendalam sektor-sektor prioritas. Transisi energi menjadi salah satu fokus utama, mengingat dunia sedang bergerak ke arah ekonomi rendah karbon. Jepang melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam pengembangan energi bersih berbasis teknologi.

Contohnya adalah proyek produksi metanol berbasis CO₂ di Bontang dan pengembangan panas bumi seperti PLTP Rajabasa. Ini bukan hanya proyek investasi, tetapi juga bagian dari transformasi energi nasional. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga lingkungan.



Di sektor migas dan hilirisasi, kami juga membahas pengembangan Blok Masela. Proyek ini sangat strategis karena akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi berbasis gas. Jepang memiliki peran penting dalam pengembangan proyek ini.

Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi benar-benar berjalan. Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengeksport bahan mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri agar manfaatnya lebih besar bagi ekonomi nasional. Di bidang teknologi, peluang kerja sama juga sangat besar. Kami membahas pengembangan semikonduktor, desain chip, hingga kecerdasan buatan. Ini sektor masa depan yang harus kita masuki jika ingin menjadi negara maju.

Kolaborasi dengan perusahaan Jepang di bidang ini akan mempercepat transfer teknologi. Kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga ikut membangun ekosistemnya. Ini penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

"Nilai kerja sama sebesar 23,63 miliar dolar AS bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa Indonesia dan Jepang sedang menulis ulang arah kemitraan ekonomi menuju level yang lebih strategis."

Kami juga membahas kerja sama di sektor keuangan dan investasi. Kemitraan antara Kadin Indonesia dan Japan Chamber of Commerce and Industry menjadi fondasi penting untuk memperluas akses pembiayaan. Ini akan membantu mendorong proyek-proyek strategis agar lebih cepat terealisasi.

Selain itu, ada inisiatif seperti Mandiri Aviation Leasing Fund yang melibatkan Danantara Indonesia dan SMBC Aviation Capital. Ini menunjukkan bahwa kerja sama sudah masuk ke level yang sangat konkret dan teknis. Artinya, kita tidak lagi bicara konsep, tetapi implementasi. Peran Danantara dalam kunjungan ini sangat krusial. Kami menjelaskan bahwa Indonesia kini tidak hanya menawarkan investasi masuk, tetapi juga membuka peluang investasi bersama. Ini pendekatan baru yang lebih kolaboratif.

Konsep invest with Indonesia mendapat respons yang sangat baik. Investor Jepang melihat adanya kepastian mitra, transparansi, dan dukungan kebijakan. Ini menjadi daya tarik utama dalam pengambilan keputusan investasi. Apakah saya puas dengan kunjungan ini? Saya bisa katakan, saya cukup puas dan optimistis. Karena yang kita bangun bukan hanya kesepakatan, tetapi kepercayaan jangka panjang. Ini fondasi yang sangat penting.

Namun saya juga realistis, bahwa pekerjaan terbesar ada di depan. Implementasi menjadi kunci utama. Kita harus memastikan bahwa semua MoU ini benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata. Kami di Kadin akan mengawal proses ini secara aktif. Kami ingin memastikan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang terus berlanjut. Kami juga akan membantu menjembatani berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.

Yang tidak kalah penting, kami ingin kolaborasi ini inklusif. Harus ada dampak nyata bagi UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi. Bagi saya, kunjungan ini menandai babak baru hubungan Indonesia-Jepang. Kita bergerak dari hubungan dagang menjadi kemitraan strategis berbasis investasi, teknologi, dan inovasi. Ini lompatan besar yang harus kita jaga.

Dan sekali lagi, 23,63 miliar dolar AS ini hanyalah awal. Ke depan, saya yakin potensinya bisa jauh lebih besar, bahkan berlipat ganda. Selama kita konsisten, disiplin, dan serius dalam menjalankannya. Tujuan akhirnya jelas: membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih inklusif. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas, yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dan saya yakin, kolaborasi Indonesia-Jepang bisa menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya.

"Jika dijalankan dengan disiplin, kolaborasi ini bukan hanya memperkuat hubungan dua negara, tetapi juga menjadi akselerator bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan naik kelas sebagai kekuatan ekonomi global."

DAFTAR ISI

Forum Bisnis Indonesia-Jepang Hasilkan Nilai Dagang 23,6 Miliar Dolar AS, Ketua Kadin Dorong RI Keluar dari Middle Income Trap	6
Iftar Ramadan di Istiqlal, Ketua Umum Kadin Ajak Dunia Usaha Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Spiritual	10
Buka Puasa Bersama Ketum Kadin Provinsi, Anindya Bakrie Bahas MBGnomics hingga Tarif Impor AS	12
Ketua Umum Kadin Minta Dunia Usaha Antisipasi Hadapi Konflik di Timur Tengah	14
Anindya Bakrie Ungkap Pemerintah dan Dunia Usaha Siap Hadapi Investigasi USTR	16
Tekan Inflasi di Kolaka, Kadin Sultra Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah	17
Resmikan SPPG MBG Kadin DKI Jakarta, Anindya Bakrie Ungkap Lebih Dari 700 SPPG Kadin Telah Beroperasi	18
Kadin dan Gapembi Dorong MBG Jadi Infrastruktur Sosial, Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja	20
Kadin Indonesia dan Perum Perumnas Menandatangani Nota Kesepahaman Dukung Program Perumahan Nasional	21
Kadin Luncurkan K-GoStore, Platform Digital Penghubung UMKM dan Rantai Pasok MBG	23
Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Kaltim 2025-2030 di Ibu Kota Nusantara	24
Forum Misi Dagang: Kadin Jatim dan Kadin DKI Jakarta Teken MoU Perdagangan	26

DAFTAR ISI

Kadin Lampung Gelar Dialog Ekonomi, Bahas Peluang dan Tantangan Tahun 2026

27

APBMI Adukan Kewajiban TKBM untuk Kapal Gearless, Kadin Siap Koordinasi dengan Tiga Kementerian

28

Kadin Jatim dan Pemprov Jatim Targetkan Terbentuknya Program Vokasi di Seluruh Kabupaten/Kota pada 2026

29

Di Rapimprov Kadin Jakarta, Anindya Bakrie Jelaskan Tiga Aspek Penting yang Perlu Diwaspadai Indonesia Hadapi Situasi Global yang Tidak Stabil

31

Kadin dan Pemprov Sumbar Serahkan 10 Huntap bagi Penyintas Banjir di Batu Busuk Padang

33



Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama jajaran delegasi Indonesia dan Jepang dalam Japan-Indonesia Business Forum yang berlangsung di The Imperial Hotel, Tokyo, Senin (30/3/2026).

Forum Bisnis Indonesia-Jepang Hasilkan Nilai Dagang 23,6 Miliar Dolar AS, Ketua Kadin Dorong RI Keluar dari Middle Income Trap

Tokyo, Jepang - Di tengah momentum kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Japan-Indonesia Business Forum bertema "Indonesia-Japan Value Co-Creation: Building the Future of Energy, Industry, and Global Supply Chains" di The Imperial Hotel, Tokyo, Senin (30/3/2026).

Forum ini diselenggarakan Kadin Indonesia bersama Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang, serta Japan Business Federation (Keidanren), berkolaborasi dengan KBRI Tokyo, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI), Japan Indonesia Association (Japinda), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.

Forum yang dihadiri langsung Presiden Prabowo ini bertujuan untuk mempertegas dan memperdalam kerja sama ekonomi strategis, khususnya di sektor prioritas seperti energi hijau

dan terbarukan, infrastruktur dan konektivitas, manufaktur, ekonomi digital, serta ketahanan pangan dan energi. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi peluang investasi konkret yang bankable, dengan memanfaatkan kerangka kerja sama seperti revisi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), momentum World Expo Osaka 2025, serta kemitraan komprehensif dan strategis kedua negara.

Dalam pidato kunci, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Jepang merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara telah terbangun selama puluhan tahun dengan kontribusi signifikan dari perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha Jepang yang telah lama berinvestasi di Indonesia dan turut menjadi bagian dari perjalanan pembangunan nasional.



Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam Japan-Indonesia Business Forum yang berlangsung di The Imperial Hotel, Tokyo, Senin (30/3/2026).

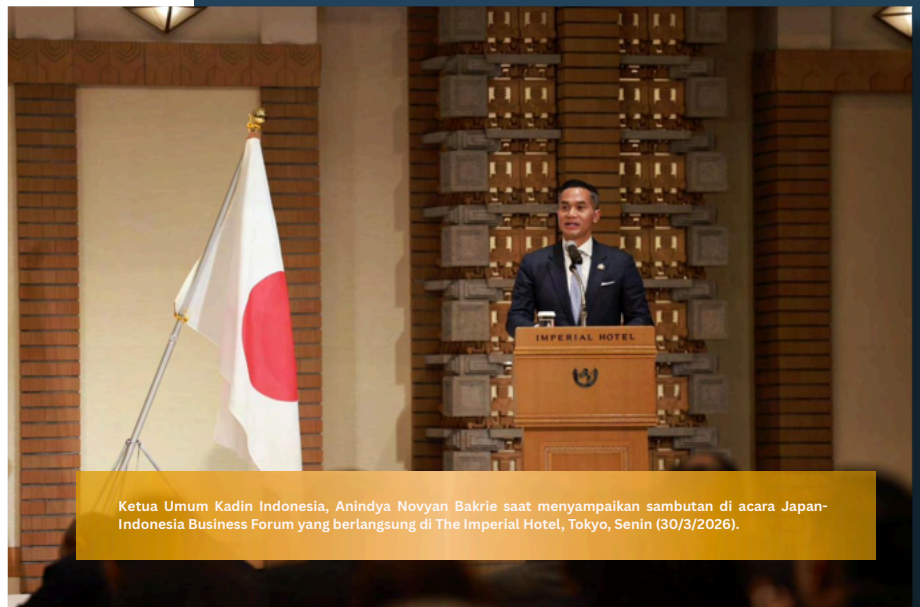
"Jepang secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak di antara Anda di ruangan ini telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Anda telah lama berada di Indonesia. Anda mengenal Indonesia dengan baik masyarakatnya, pasarnya, budayanya, dan potensinya," ujar Presiden Prabowo dikutip laman resmi presidenri.go.id.

Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadirannya di forum tersebut bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang telah terjalin, tetapi juga untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Kepala Negara menekankan pentingnya kerja sama

erat di tengah dunia yang semakin terhubung, serta meyakini bahwa kemitraan ekonomi yang kuat akan menciptakan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan.

"Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan," ungkap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, meskipun hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin panjang, tantangan ke depan menuntut langkah yang lebih progresif, terutama untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan sambutan di acara Japan-Indonesia Business Forum yang berlangsung di The Imperial Hotel, Tokyo, Senin (30/3/2026).

"Indonesia harus keluar dari middle income trap. Dan salah satu caranya ialah dengan investasi dan inovasi supaya pertumbuhan bisa lebih daripada sebelumnya," kata Anin sapaan akrabnya.

Anin juga menyoroti pentingnya ketahanan dan adaptasi dunia usaha di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik yang mempengaruhi perekonomian dunia.

"Kita mengerti dan sensitif, bahwa sekarang pada saat ini kita fokus bergerak ke mana dengan berani hasil daripada perang di tengah-tengah. Tapi kami yakin masih ada jalan. Nah, jadi ini juga suatu hal yang bisa dibicarakan antara kedua negara untuk mengembangkan lebih baik lagi. Intinya bagaimana kita bisa bertahan dalam bisnis ini," tutup Anin.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) strategis turut diumumkan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, industri, hingga keuangan dan teknologi dengan total nilai perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar 23,6 miliar dolar AS. Berikut di antaranya:

MoU antara Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) dan Kadin Indonesia tentang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

01

02

MoU antara INPEX dan PT Pertamina (Persero) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia.

MoU antara INPEX dan PT Pertamina Hulu Energi terkait potensi kerja sama di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara.

03

04

MoU antara Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan PT Eblo Teknologi Indonesia Development tentang pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik dan AI.

MoU antara INPEX dan PT Supreme Energy Rajabasa terkait pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi Rajabasa.

05

06

MoU antara PT Bank SMBC Indonesia dan PT Pegadaian untuk mendukung ekosistem emas nasional dan inklusi keuangan.

MoU antara 2Way World dan PT Nose Herbal Indo dalam pengembangan Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership.

07

08

MoU antara SMBC Aviation Capital, Danantara, dan Mandiri Investment Management terkait pembentukan dana leasing aviasi.

MoU antara JETRO dan Danantara Investment Management untuk memperkuat hubungan kerja sama investasi.

09

10

MoU antara PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur tentang produksi metanol berbasis pemanfaatan emisi CO₂ (carbon capture utilization/CCU)

MoU antara JICA dan Pemerintah Indonesia tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hululais

11

Hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri RI Sugiono,

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, WKU Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega dan WKU Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Galeri Rangkaian Business Mission Kadin Indonesia ke Jepang



01

Pertemuan delegasi Kadin Indonesia dengan CEO ADB Institute, Prof. Bambang Brodjonegoro di Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang (30/3/2026).

02

Pertemuan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dengan CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang (30/3/2026).



03

Pertemuan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dengan Chairman Japan External Trade Organization (JETRO), Norihiko Ishiguro, di Tokyo, Jepang (30/3/2026).

04

Penandatanganan MoU antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dengan Chairman of Japan Chambers of Commerce and Industry (JCCI) Ken Kobayashi, di Tokyo, Jepang (30/3/2026).



05

Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama Delegasi Indonesia dan Jepang dalam acara Japan - Indonesia Business Forum yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang (30/3/2026).

06

Delegasi Indonesia berfoto bersama dalam acara Japan - Indonesia Business Forum yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang (30/3/2026).





Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran pengurus memberikan santunan kepada 5.700 anak yatim piatu bertepatan dengan usia organisasi yang ke-57, dan santunan diberikan secara simbolik kepada 20 perwakilan anak yatim piatu yang hadir.

Iftar Ramadan di Istiqlal, Ketua Umum Kadin Ajak Dunia Usaha Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Spiritual

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama (Iftar Ramadan) Kadin Indonesia dengan tema “Meneguhkan Ketahanan Indonesia di Tengah Dinamika Dunia: Mempererat Silaturahmi, Memperkuat Ekonomi Rakyat” di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/03/2026).

Acara yang digelar di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan ini dilakukan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sekaligus mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kebersamaan di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa agenda ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi dengan rohani.

Kadin melaksanakan buka puasa bersama hari Jumat hari ini di Istiqlal, karena ini adalah saatnya untuk dunia usaha menguatkan bukan saja kekuatan fisik dan juga ekonominya,

tapi juga menguatkan dari sisi spiritual atau rohaninya,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Anin juga mengajak seluruh pihak untuk mendoakan perdamaian di Timur Tengah yang saat ini sedang bergejolak. Anin berharap konflik tersebut segera berakhir demi kemanusiaan.

“Satu, di Timur Tengah sedang ada dinamisme yang luar biasa. Nah, ini patut kita doakan supaya saudara-saudara kita penderitanya berkurang bahkan hilang dengan berhentinya perang secepat mungkin,” kata Anin.

Anin tidak menampik bahwa konflik di Timur Tengah membawa dampak sistemik terhadap perekonomian nasional, terutama terkait fluktuasi harga komoditas energi dan stabilitas moneter.



Foto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi di acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama (Iftar Ramadan) Kadin Indonesia dengan tema “Meneguhkan Ketahanan Indonesia di Tengah Dinamika Dunia: Mempererat Silaturahmi, Memperkuat Ekonomi Rakyat” di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/03/2026).

“Dan yang kedua, semoga dampaknya ke Indonesia, baik dengan naiknya minyak maupun dengan bisa dilihat apa, nilai tukar rupiah itu melemah sampai kepada interest rate atau suku bunga yang bisa naik, semoga semua ini bisa kita tanggulangi dengan baik seperti krisis-krisis sebelumnya,” terang Anin.

Meski menghadapi tantangan yang tidak mudah, Anin menegaskan bahwa internal Kadin tetap solid dalam menghadapi ketidakpastian global. Anin meyakini bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam melewati berbagai krisis.

"Tapi patut kita sampaikan di sini, Kadin kompak, Kadin semangat untuk bisa menjawab tantangan ini. Tentu tidak mudah, tapi ini dikenakan oleh seluruh negara di dunia," tegas Anin.

Dalam rangkaian acara tersebut, Kadin juga menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan santunan kepada 5.700 anak yatim piatu bertepatan dengan usia organisasi yang ke-57, dan santunan diberikan secara simbolik kepada 20 perwakilan anak yatim piatu yang hadir.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta jajaran pengurus Kadin memberikan santunan kepada perwakilan anak yatim piatu yang hadir dalam Iftar Ramadan Kadin Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/03/2026).

"Jadi kita hadir, tadi juga ada santunan kepada 5.700 anak yatim karena kita ulang tahun ke-57 tahun ini, Kadin," jelas Anin.

Lebih lanjut, Anin menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga keagamaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

"Bagaimana dunia usaha dan juga pengelola Masjid bisa bekerja sama, dan Masjid bukan saja menjadi tempat ibadah, tapi tempat yang bisa memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat sekitarnya dan juga Indonesia," tambah Anin.

Lebih lanjut, Anin juga memberikan perhatian khusus pada pergerakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

"Jadi nomor satu tentunya dari sisi minyak. Itu setiap di atas dari 60 dolar AS, yaitu asumsi APBN, tentu dampaknya akan terasa. Tapi memang kita mesti lihat dalam jangka satu bulan, dua bulan ini. Satu titik di atas 100 dolar AS, sekarang sudah di bawah 100 dolar AS, kita mesti lihat stabilnya di mana," ungkap Anin.

Anin juga mewanti-wanti adanya potensi gangguan pada rantai pasok global yang dapat memicu inflasi di dalam negeri.

"Lalu juga dengan nilai tukar rupiah, suku bunga, inflasi karena rantai pasok dan lain-lain. Nah, ini semua benar-benar kita mesti hitung baik-baik. Tapi memang mau tidak mau, di dunia usaha mesti melakukan efisiensi karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan," papar Anin.

Di sisi lain, Anin menekankan dua sektor utama yang harus dijaga demi stabilitas nasional di tengah ketegangan geopolitik.

"Bagaimana memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ya dua itu mesti kita jaga, baik sebagai industri maupun juga ketahanan stabilitas nasional," jelas Anin.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar dalam sambutannya menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai religiusitas dan pembangunan ekonomi nasional. Menag Nasaruddin menyatakan bahwa keberkahan ekonomi sebuah bangsa sangat bergantung pada kedekatannya dengan nilai agama.

"Ekonomi tanpa dekat dengan agama itu tidak berkah. Ingat saja itu," ujar Nasaruddin.

Lebih jauh, Nasaruddin menyoroti tantangan moral dalam praktik ekonomi saat ini. Ia menekankan bahwa konflik atau "adu domba" yang sering terjadi di masyarakat kerap dipicu oleh praktik konsumsi atau pendapatan yang tidak halal. Sebagai solusi, pemerintah tengah mendorong penguatan ekonomi yang bersih dan berkeadilan.

"Kita mencoba untuk membuat satu kekuatan ekonomi yang zero exploitation of human (nol eksploitasi manusia). Kita sudah mulai masuk ke arah sana," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga memberikan testimoni positif terhadap visi fundamental Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ide-ide dasar yang dibawa Presiden merupakan langkah transformatif yang mampu membawa perubahan besar bagi bangsa jika dijalankan secara konsisten sesuai teori yang dicanangkan.

"Percayalah bahwa Insya Allah dengan berkolaborasi, kita akan melihat wajah baru untuk dunia perekonomian kita di masa yang akan datang," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKUK Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani dan WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar, serta para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.

Hadir pula jajaran Ketua Umum Kadin Provinsi di antaranya Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Sumatra Utara Firsal Ferial Mutyara, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi, Ketum Kadin Provinsi Kepulauan Riau Mustava, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Anton Timbang, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M. Nur DG. Rahmatu serta Ketum Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio.



Buka Puasa Bersama Ketua Kadin Provinsi, Anindya Bakrie Bahas MBGnomics hingga Tarif Impor AS

Buka Puasa Bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dengan jajaran Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dan Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi seluruh Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/02/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia dan jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi seluruh Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/02/2026).

Anindya, yang akrab disapa Anin, mengatakan bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.

“Kita mengundang seluruh Ketua Umum Kadin Provinsi untuk hadir, untuk melihat bagaimana menggiatkan perekonomian sampai ke daerah,” ujar Anin.

Ditegaskan Anin bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional harus terus dijaga, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota.

“Di dalam PDB (Produk Domestik Bruto), selain dari sisi belanja pemerintah yang mesti kita tanyakan sama-sama sudah sampai di mana, juga berlanjut kepada konsumsi domestik. Bagaimana keadaan perdagangan dan perekonomian di daerah, sampai kepada ekspor-impor,” kata Anin.

Selain itu, Anin juga memaparkan hasil diplomasi luar negeri yang telah dilakukan, khususnya terkait investasi.

“Terakhir ialah investasi. Kita ingin bagaimana bekerja sama supaya investasi benar-benar masuk, menambah lapangan kerja, dan menciptakan pengusaha baru,” ujar Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Program prioritas pemerintah ini perlu kita jaga dan kawal supaya sukses. Dengan begini teman-teman daerah bisa memberikan gambaran di lapangan dan membantu mendukung supaya benar-benar jalan,” jelas Anin.

Anin menekankan bahwa program-program tersebut menggunakan APBN sehingga harus dipastikan tepat sasaran dan memberi efek turunan ekonomi.

“Bukan saja sampai kepada yang membutuhkan, tapi juga turunannya terjadi. Sehingga dalam waktu singkat Kadin akan meluncurkan kajian MBGnomics,” kata Anin.

Dijelaskan Anin, MBGnomics akan mengkaji bagaimana program MBG dapat membantu generasi berikutnya, termasuk sekitar 80 juta anak-anak dan ibu menyusui, sekaligus menciptakan peluang usaha baru di daerah.

“Bagaimana teman-teman daerah bisa menjadi pengusaha yang berhasil di bidang bahan baku, supply chain, ekosistem, dan lain-lain. Jadi itulah alasan kita juga bersilaturahmi hari ini,” tutur Anin.

Tanggapan Soal Tarif Impor AS 15 Persen

Menanggapi isu tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 15 persen, Anin menekankan pentingnya posisi AS sebagai mitra dagang utama Indonesia.

"Kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat, perlu dicatat bahwa Amerika (Serikat) itu adalah mitra berdagang kita yang nomor dua terbesar. Jumlahnya sekitar 40 miliar dolar AS. Jadi sangat penting sekali, terutama untuk garmen, tekstil, alas kaki, sampai furniture dan elektronik," ujar Anin.

Anin menyampaikan, terdapat lebih 1.000 jenis produk yang memperoleh insentif tarif hingga 0% untuk ekspor ke AS, termasuk komoditas kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Tujuannya itu untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia bisa masuk ke Amerika (Serikat) dengan tarif sedang mungkin bahkan 0 persen," jelas Anin.

Terkait keputusan Mahkamah Agung di AS, Anin menilai hal tersebut memang sudah sempat diprediksi dan tidak membuat posisi Indonesia menjadi lebih buruk.

"Yang paling penting adalah kita melihat niat baik dari kedua negara sudah terbentuk. Dengan adanya keputusan itu, pihak Amerika (Serikat) tentu akan melakukan pekerjaan rumahnya untuk mengatur peraturan dalam negerinya. Tapi Indonesia saya rasa tidak akan lebih jelek daripada sebelumnya," ujar Anin.

Anin optimistis perdagangan Indonesia-AS akan tetap memberikan hasil positif. Terlebih, sejumlah komoditas yang diimpor dari AS seperti kedelai, kapas, dan gandum memang dibutuhkan industri dalam negeri.

"Yang penting dari kita adalah harganya terjangkau. Kalau harganya 0 persen, artinya buat konsumen kita tentunya lebih murah," kata Anin.

Lebih lanjut, menanggapi perubahan kebijakan tarif AS, Anin mengatakan bahwa pelaku usaha nasional justru perlu meningkatkan kapasitas produksi untuk menangkap peluang ekspor.

Indonesia mesti siap-siap untuk memperluas kapasitas produksinya. Kalau sudah terbuka pasar baik di Amerika (Serikat), juga Eropa, Kanada, dan pada umumnya mereka bicara produk-produk yang sama, bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa menghasilkan ekspor dan devisa yang lebih," tegas Anin.

Menurut Anin, dunia usaha harus mulai berpikir ofensif dalam arti memperluas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi baru.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan keterangan terkait isu tarif impor AS kepada para awak media di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/02/2026).

"Bukan hanya defensif dari sisi bertahan, tapi kalau sudah dibuka jalan bagaimana bisa lebih ofensif dalam arti memperluas produksi. Tentunya itu berarti lapangan kerja dan investasi. Itu mesti dipikirkan baik-baik," pungkas Anin.

Hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia dalam acara tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri James Riady, WKUK Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Sosial Nita Yudi, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani, WKUK bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasana Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.

Sementara dari Ketum Kadin Provinsi hadir di antaranya Ketum Kadin Provinsi Aceh Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Utara Firsal Ferial Mutyara, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Affandi Udji, Ketum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi, Ketum Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ritchie Glen Yaprana dan Ketum Kadin Provinsi Kepulauan Riau Mustava.

Juga Ketum Kadin Provinsi Jawa Tengah Harry Nuryanto, Ketum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Timur Putri Amanda Nurramadhani, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing, Ketum Kadin Provinsi Bali I Made Ariandi, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Nur DG. Rahmatu, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Anton Timbang, Ketum Kadin Provinsi Maluku Muhammad Armin Syarif Latuconsina, Ketum Kadin Provinsi Papua Tengah Alexander Gobai serta Ketum Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio

Ketua Umum Kadin Minta Dunia Usaha Antisipasi Hadapi Konflik di Timur Tengah

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, mengatakan bahwa dunia usaha perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya usai agenda Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan, Kamis (05/03/2026).

Dijelaskan Anin bahwa Kadin menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait situasi geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Menurut Anin, dunia usaha perlu bersiap karena konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.

“Kami catat bahwa perang di Timur Tengah ini bisa berlangsung mungkin lebih lama dari yang pertama kali kita prediksi. Jadi apakah itu 4-5 minggu mungkin suatu yang harus kita antisipasi,” ujar Anin.

Dalam situasi tersebut, Anin menekankan pentingnya tiga aspek utama yang harus dijaga, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional.

“Satu, ketahanan energi sangat penting. Saya mengerti bahwa dari sisi pemerintah sudah melakukan rapat bagaimana untuk melakukan analisa harga BBM tapi juga LPG dan LNG (gas alam cair) yang langsung sampai kepada masyarakat,” terang Anin.

Selain energi, Anin menilai ketahanan pangan juga menjadi isu strategis di tengah dinamika global.

“Yang kedua adalah ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga kestabilan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anin menjelaskan bahwa stabilitas menjadi faktor kunci sebelum ekonomi dapat kembali fokus pada pertumbuhan. Di sisi dunia usaha, Anin menilai terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satunya adalah memperkuat pasar domestik.

“Jadi pertama, kita lihat bahwa banyak sekali hingar-bingar yang terjadi di masyarakat dan juga di dunia usaha. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dunia usaha melakukan 3 hal.

Yang pertama ialah bagaimana dunia usaha bisa terus meningkatkan kekuatan pasar,” jelas Anin

Anin juga menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan pasar baru melalui intervensi kebijakan pemerintah. Selain itu, dunia usaha juga perlu memperkuat rantai pasok agar lebih tangguh dalam menghadapi tekanan global.

“PR (pekerjaan rumah) berikutnya ialah bagaimana menciptakan supply chain yang lebih resilient sehingga bisa menjaga tentunya harga dari bahan pasok tersebut,” kata Anin.

Terkait hal itu, Kadin tengah menyiapkan kajian mengenai dampak ekonomi dari program MBG yang disebut sebagai MBGnomics.

“Bukan saja bagaimana bisa memberikan makanan kepada 80 juta anak dan ibu-ibu menyusui, tapi juga dampak ekonominya sampai kepada lapangan kerja serta apa yang harus juga dilakukan supaya supply chainnya bisa lebih kuat atau rantai pasoknya,” tutur Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia usai Rapat Dewan Pengurus Harian di Menara Kadin Indonesia pada Kamis (05/03/2026).

Menurut Anin, isu ketahanan pangan menjadi semakin penting dalam kondisi global saat ini. Anin juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Untuk itu, Kadin akan kembali menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) pada bulan Mei atau Juni mendatang.

“Dan pada saat ini ketahanan pangan sangat penting. Kita menyambut baik bahwa beras sudah swasembada tapi kedepannya juga apa lagi. Termasuk juga bagaimana supaya ekspor daripada produk-produk kita seperti kelapa sawit itu bisa terus terjaga yang sangat dibutuhkan pada saat ini,” ungkap Anin.

Selain itu, Kadin juga menaruh perhatian pada keberlangsungan usaha anggota, termasuk pelaku UMKM dan pengusaha di daerah, serta stabilitas lapangan kerja.

“Oleh karenanya Kadin ini selalu melakukan konsolidasi ke dalam. Tadi (di Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia) ada beberapa hal (yang dibicarakan) selain daripada pangan, energi, kita bicara juga aspek finansial,” tutur Anin.

Lebih lanjut, Kadin kata Anin juga membahas kondisi sektor keuangan nasional. Anin menilai likuiditas perbankan masih berada pada level yang cukup baik.

“Kita melihat memang likuiditas masih cukup baik di interbank 160 triliun (rupiah). Tapi kita perhatikan apakah angka suku bunganya ada merah naik atau tidak. Karena ini juga suatu tolak ukur yang sangat penting” ujar Anin.

Selain agenda ketahanan pangan, Kadin juga tengah menyiapkan Kadin Investment Week yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang untuk mendorong peningkatan investasi. Anin menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian global.

“Karena dibutuhkan begitu banyak investasi di tengah pada tentunya was-was dengan kejadian di Timur Tengah. Tapi yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa Indonesia Incorporated itu kompak, bersatu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah agar supaya kita bisa melewati ini semua. Bahkan ini kesempatan kita juga untuk melakukan perubahan mindset,” tambah Anin.

Anin juga mendorong dunia usaha untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat kolaborasi dengan Danantara serta lembaga investasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan global, Anin menegaskan dunia usaha tetap menjaga optimisme.

“Tapi pada intinya, mood-nya tetap hati-hati, tapi mood-nya tetap kita optimistis untuk bisa bertahan, menjaga kestabilan dan di ujungnya tentu untuk pertumbuhan,” pungkaskan Anin.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Erwin Aksa, WKUK Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Sosial Nita Yudi, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe serta para Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan pengurus Kadin Indonesia.

Anindya Bakrie Ungkap Pemerintah dan Dunia Usaha Siap Hadapi Investigasi USTR



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (17/03/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR).

Investigasi ini merujuk pada Section 301 dari Trade Act 1974 dengan fokus utama pada dua isu krusial, yakni kelebihan kapasitas produksi yang memicu praktik dumping serta isu tenaga kerja paksa.

“Untuk investigasi ini, persiapan matang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha agar seluruh prosesnya berjalan dengan baik,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto,

“Jadi kita mesti berpikir untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas industri pada saat ini,” kata Anin.

Meskipun akan digelar investigasi, Anin merasa lega karena subjek yang ditargetkan tidak menasar produk ekspor unggulan Indonesia ke AS. Berbagai komoditas utama seperti alas kaki, tekstil, furnitur, elektronik, hingga minyak kelapa sawit diprediksi tidak akan terdampak secara langsung.

“Yang paling menenangkan adalah seluruh fokus ekspor utama Indonesia tidak masuk dalam subjek investigasi tersebut,” jelas Anin.

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (17/03/2026).

Menurut Anin, persiapan ini sangat vital untuk memproteksi ekosistem industri dalam negeri.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu tetap optimis dalam menghadapi tantangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), serta terus memperluas akses pasar yang kini mulai terbuka di kawasan lain seperti Uni Eropa dan Kanada.

Anin juga meyakini bahwa dua isu yang diangkat oleh USTR tidak ditemukan dalam praktik industri di Indonesia.

Dari sisi regulasi, Indonesia secara tegas melarang penggunaan tenaga kerja paksa, baik untuk produk ekspor maupun impor.

Sementara itu, terkait isu kelebihan kapasitas untuk praktik dumping, Anin memastikan hal tersebut tidak terjadi karena struktur industri Tanah Air saat ini lebih berfokus pada pemenuhan pasar domestik serta bersifat komplementer dengan kebutuhan pasar AS.

“Dan yang terakhir juga kita mesti berpikir positif bahwa setelah kita lalui ini semua dengan Amerika (Serikat) jangan lupa bawa akses pasar yang telah dibuka baik Uni Eropa dan juga Kanada dan lain-lain ini juga mempunyai suatu permintaan produk yang sama. Jadi kita mesti berpikir untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas pada saatnya” tutup Anin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani memberikan keterangan pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (17/03/2026).

Tekan Inflasi di Kolaka, Kadin Sultra Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah



Suasana Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Camat Pomalaa, Kabupaten Kolaka, pada 7-8 Maret 2026 yang digelar oleh Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara

Kolaka – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Camat Pomalaa, Kabupaten Kolaka, pada 7-8 Maret 2026.

Program yang menysasar langsung kebutuhan masyarakat ini menjadi salah satu langkah konkret Kadin Provinsi Sultra dalam membantu menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sultra.

Ketua Umum Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang menyebut bahwa pelaksanaan GPM juga mendapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan bagi Kadin Provinsi Sultra untuk terus menghadirkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu daya beli masyarakat.

“Kami mengapresiasi perhatian beliau dalam menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat,” ujar Anton.

Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan roda ekonomi, terutama melalui keterlibatan dunia usaha dalam berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dunia usaha harus ikut mengambil bagian dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anton.

Ditambahkan Anton, bahwa GPM merupakan program berkelanjutan yang digelar di sejumlah daerah dengan tingkat tekanan inflasi cukup tinggi. Program tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di Kendari, kemudian berlanjut di Kabupaten Kolaka, dan selanjutnya direncanakan menyasar Kota Baubau.

“Kami melihat ada beberapa daerah yang mengalami tekanan inflasi cukup tinggi seperti Kolaka dan Baubau. Karena itu Kadin Sultra berinisiatif menghadirkan Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” jelas Anton.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kabupaten Kolaka Vebrianti Safrudin, mengungkapkan

sebanyak 12.000 paket kebutuhan pokok disiapkan dalam kegiatan tersebut. Paket sembako itu berisi beras 5 kg seharga Rp55.000, gula pasir 1kg Rp13.000, dan minyak goreng 1 liter Rp14.000, dengan potongan harga hingga Rp5.000 per paket.

“Inflasi di Kolaka saat ini mengalami kenaikan. Di sinilah peran Kadin hadir sebagai mitra pemerintah. Jika pemerintah mengatur birokrasi, maka Kadin mengayomi pengusaha untuk bersama-sama mencari solusi ekonomi bagi daerah,” kata Vebrianti.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari.

KABAR QUICK WINS:

Resmikan SPPG MBG Kadin DKI Jakarta, Anindya Bakrie Ungkap Lebih Dari 700 SPPG Kadin Telah Beroperasi



Peresmian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kadin Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (dua dari kiri), Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi (tiga dari kiri) berlokasi di Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, pada Jumat (06/03/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie meresmikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kadin Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, pada Jumat (06/03/2026).

Anindya, yang akrab disapa Anin, mengatakan peresmian dapur MBG tersebut menjadi momen yang membahagiakan karena merupakan SPPG ke-742 yang dibangun oleh jaringan Kadin di berbagai daerah.

“Dan target kita mau mencoba tembus seribu, insya Allah bisa tercapai. Karena sekarang sudah ada direncanakan 230-an lebih untuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Jadi, hari ini adalah hari yang sangat bahagia,” ujar Anin.

Anin menambahkan, dapur MBG di Jakarta ini merupakan yang pertama di ibu kota dan diresmikan bertepatan dengan bulan Ramadan. Menurut Anin, dunia usaha sejak awal mendukung program MBG karena dinilai sebagai program strategis pemerintah yang merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Di awal, tentu kami mendukung program pemerintah karena ini program strategis yang biayanya tidak kecil. Dan tentu dari dunia usaha harus bersama-sama mengamankan program strategis ini. Apalagi ini investasi jangka panjang,” ujar Anin.

Dijelaskan Anin, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi nasional.

“Anak-anak kita, 80 juta orang bersama ibu-ibunya menyusui kita berikan perhatian. Karena setiap saya keluar negeri, baik untuk urusan Kadin atau diplomasi internasional maupun urusan olahraga atau bisnis, saya selalu melihat bagaimana Indonesia bisa bersaing secara global,” kata Anin.

Anin menilai pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas nasional. Anin juga menyoroti potensi ekonomi yang dihasilkan dari pengoperasian dapur-dapur MBG.

"Bahwa setiap SPPG bisa sampai 50 orang (pekerja). Artinya, kalau Kadin sampai kepada 1000 SPPG bersama-sama 50 ribu bisa serap itu, Alhamdulillah sekali. Lalu selain itu tentunya sekitar 3.000 daripada makanan, ya kalau dikalikan 1.000 ya 3 juta setiap hari," jelas Anin.

Selain menyerap tenaga kerja, Anin mengatakan pembangunan SPPG juga mulai menarik dukungan pembiayaan dari sektor perbankan.

"Artinya memang benar bahwa SPPG di DKI Jakarta ini bankable atau patut untuk diberikan pendanaan dari bank. Dan secara kolektif kalau kira-kira Rp1,5 miliar dikalikan 1000 itu Rp1,5 triliun hampir 100 juta dolar AS dari teman-teman Kadin," ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menegaskan Kadin juga akan berperan dalam memperkuat rantai pasok atau supply chain program MBG agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Anin menambahkan, penguatan rantai pasok tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha baru di sektor pangan, mulai dari peternak ayam petelur hingga produsen sayur-mayur dan daging.

"Nah kita ketahui bahwa begitu mahalnya MBG, supply chain ini menjadi suatu peluang yang luar biasa. Sehingga di Kadin mengatakan bahwa kami akan serius di 2026 untuk menangani rantai pasok ini," ujar Anin.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kadin kata Anin berencana menggelar Food Security Summit pada Juni mendatang guna membangun ekosistem rantai pasok pangan yang lebih terintegrasi.

"Bagaimana membuat rantai pasok ini menjadi suatu close loop sehingga teman-teman yang berkiprah itu mempunyai pendampingan yang baik. Kami juga melihat dan sedang mengkaji MBGnomics. Nah kami tidak melihat dari sisi dampak lain, Kecuali dari ekonomi dan juga dunia usaha," kata Anin.

bih lanjut, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan dunia usaha tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami percaya, ketika pengusaha bergerak bersama, yang tumbuh bukan hanya ekonomi, tetapi juga harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dunia usaha harus hadir bukan hanya di ruang investasi, tetapi juga di ruang-ruang kemanusiaan," ujar Diana Dewi.

Menurut Diana, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Kadin Indonesia agar seluruh jajaran Kadin di daerah aktif berkontribusi dalam program-program strategis nasional.

"Dapur SPPG ini bukan sekadar tempat memasak. Ini adalah simbol gotong royong antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dari dapur-dapur ini lahir energi baru untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera," kata Diana.

Sementara itu, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Dirgayuza Setiawan mengatakan program MBG merupakan bagian dari tren global dalam investasi gizi.

Diungkapkan Dirgayuza, laporan terbaru World Food Programme (WFP) menyebutkan semakin banyak negara yang menjalankan program serupa.

"Laporan terakhir World Food Program badan dari PBB menyampaikan tahun kemarin sudah 107 negara yang menjalankan MBG di seluruh dunia. Kita adalah negara ke-107 yang menjalankan secara masif," ujar Dirgayuza.

Menurutnya, investasi di sektor gizi terbukti memberikan tingkat pengembalian yang tinggi bagi pembangunan suatu negara.

"Karena ternyata investasi di bidang gizi ini return-nya sangat tinggi. Nah, saya sangat berharap dapur yang dikelola oleh Kadin yang sudah 700 jumlahnya bisa menjadi dapur-dapur yang amanah, dapur-dapur yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat MBG kalau dijalankan dengan baik," pungkasnya.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi pada saat meninjau proses persiapan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diresmikan di Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, pada Jumat (06/03/2026).

Kadin dan Gapembi Dorong MBG Jadi Infrastruktur Sosial, Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja



Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (enam dari kanan) berfoto bersama Kepala Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya (empat dari kiri), Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti (enam dari kiri) pada MBG Talks dengan tema "MBG Future: MBG Sebagai Infrastruktur Sosial Nasional" yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia Jakarta pada Jumat (27/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menggelar acara Makan Bergizi Gratis (MBG) Talks dengan tema "MBG Future: MBG Sebagai Infrastruktur Sosial Nasional" yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia Jakarta pada Jumat (27/02/2026).

Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia, Chandra Tirta Wijaya, menyampaikan harapannya agar program MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai fondasi infrastruktur sosial nasional.

"Kami ucapkan selamat, supaya apa yang menjadi cita-cita MBG ini juga bisa menjadikan infrastruktur sosial. Jadi infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur bangunan, juga menjadi sosial," ujar Chandra.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sony Sonjaya mengatakan kehadiran MBG membuka wawasan baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui asupan gizi yang terukur dan terencana.

"MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia," ujar Sony.

Dia menuturkan, perubahan pola pikir tersebut terlihat pada meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi. Jika sebelumnya anak-anak hanya makan tanpa memahami komposisi gizi, kini mereka mulai mengenal unsur karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dalam menu harian.

Dari sisi implementasi, Sony mengungkapkan, saat ini terdapat 1.067.000 tenaga kerja yang telah terlibat dalam operasional 22.900 SPPG. Sementara itu, total 24.320 SPPG telah terverifikasi, dan seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

"Inilah yang membuat bedanya school meal-nya Indonesia dengan school meal-nya negara lain. Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur, tapi Indonesia 100% infrastruktur untuk school meal ini dibangun oleh masyarakat," kata Sony.

Lebih lanjut, Ketua Umum Gapembi Alven Stony menyampaikan program MBG telah berjalan sejak Januari 2024. Awalnya, target pembangunan SPPG hanya 5.000 unit, namun kemudian ditingkatkan hingga 24 ribu unit sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, percepatan pembangunan dapur dan fasilitas SPPG yang begitu cepat telah menghadirkan tantangan teknis. Namun, sebagai mitra, pelaku usaha berkomitmen menjaga standar operasional sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan BGN.

"Kami sebagai orang bisnis melihat sesuatu speed up sekali ini, BGN ini dalam membina para mitra. Tentunya dengan begitu cepatnya pembangunan dapur pasti ada kelemahan. Kita ini kan manusia. Jadi, tidak mungkin tidak error," ucap Alven.

Alven juga meluruskan persepsi publik terkait skema investasi. Pembangunan dapur dan pengadaan peralatan dilakukan oleh mitra dengan dana sendiri, bukan dibiayai negara. Mitra hanya memperoleh insentif atas investasi dan penyewaan fasilitas sesuai ketentuan program.

"Banyak yang belum memahami bahwa mitra berinvestasi sendiri. Kami juga ingin zero accident karena jika terjadi sesuatu, investasi kami yang terdampak," pengkas Alven.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Barat Buchari Bachter dan Ketua Umum Kadin Provinsi Bali I Made Ariandi.

Hadir sebagai narasumber dalam MBG Talks di antaranya Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN RI Prof. Sitti Adha Taridala, Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari dan Wartawan Senior Indonesia Bambang Harymurti.

Kadin Indonesia dan Perum Perumnas Menandatangani Nota Kesepahaman Dukung Program Perumahan Nasional



Foto bersama jajaran Pengurus Kadin Indonesia dan Perum Perumnas usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada Jumat (20/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Strategis dalam Mendukung Program Perumahan Nasional yang berlangsung di Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada Jumat (20/02/2026).

MoU dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BUMN sektor perumahan dan dunia usaha nasional guna mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Dalam MoU tersebut, Para Pihak sepakat menjajaki berbagai ruang lingkup kerja sama, antara lain:

- Program pendanaan dan skema pembiayaan perumahan, termasuk fasilitasi pendanaan dari dalam dan/atau luar negeri;

- Edukasi, sosialisasi, dan pemasaran Program Business-to-Business (B2B) Home Ownership Program (HOP) Perumnas kepada anggota dan afiliasi Kadin;
- Pemberian harga jual khusus dan insentif penjualan bagi anggota Kadin;
- Kolaborasi pemanfaatan dan pengembangan lahan;
- Penguatan ekosistem perumahan melalui dukungan kebijakan dan kemudahan regulasi untuk menjaga keseimbangan sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand).

WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata peran aktif Kadin Indonesia dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya di sektor perumahan dan pembangunan kewilayahan.

Hal ini kata Carmelita, tidak lepas dari peran sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, karena memiliki dampak berantai yang luas terhadap berbagai sektor industri, seperti industri konstruksi, material bangunan, sektor pembiayaan, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Untuk itu, melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan kebutuhan hunian anggota dan ekosistem dunia usaha dapat terhubung secara efektif dengan produk dan program Perumnas," Carmelita.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menegaskan bahwa kemitraan dengan Kadin Indonesia membuka peluang perluasan akses pasar serta inovasi skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja dan pelaku usaha.

Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sisi pembiayaan, peningkatan akses kepemilikan hunian, serta optimalisasi potensi kolaborasi antara BUMN dan dunia usaha, lanjutnya.

Selain itu, akan dilakukan juga Home Ownership Program (HOP) hunian Perumnas kepada anggota, karyawan, atau afiliasi Kadin Indonesia melalui berbagai agenda dan forum yang disepakati bersama. Untuk meningkatkan daya tarik program, Perumnas juga memberikan harga jual khusus atas produk hunian bagi anggota dan afiliasi Kadin, serta insentif penjualan apabila terjadi realisasi transaksi melalui jaringan Kadin.

MoU ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak. Ketentuan teknis dan komersial akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

Melalui penandatanganan ini, Kadin Indonesia dan Perumnas berharap tercipta model kolaborasi yang tidak hanya memperluas akses kepemilikan hunian, tetapi juga memperkuat ekosistem perumahan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Bidang WKU Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kadin Indonesia Dhony Rahajoe, WKU Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia Sharmila Yahya, Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri dan Direktur Manajemen Risiko & Legal Perumnas Nixon Sitorus.

Kadin Luncurkan K-GoStore, Platform Digital Penghubung UMKM dan Rantai Pasok MBG



Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya (empat dari kanan) berfoto bersama CEO PT Affan Technology Indonesia (Parto.id) Ikhsan Setia Budi (tiga dari kanan), Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Desi Arianti (empat dari kiri), Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony (kanan) dalam Peluncuran Kadin Grosir Store (K-GoStore) dengan menggandeng platform [Parto.id](#), berlangsung di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan pada Jumat (13/03/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan platform toko digital Kadin Grosir Store (K-GoStore) dengan menggandeng platform [Parto.id](#) yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan pada Jumat (13/03/2026).

Platform ini diinisiasi untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang menghubungkan pemasok UMKM dengan para pembeli, baik pelaku UMKM lainnya maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat mendorong penguatan ekosistem usaha, khususnya dalam mendukung program MBG.

“Selamat kepada [Parto.id](#) dan Kadin Indonesia untuk kerja sama ini. Mudah-mudahan berhasil dan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Chandra.

Sementara itu, Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Desi Arianti menjelaskan bahwa ekosistem program MBG memiliki potensi rantai pasok yang sangat besar.

Menurutnya, Kadin saat ini memiliki sekitar 750 dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Desi menilai keberadaan K-GoStore akan menjadi penghubung penting antara para pemasok dengan kebutuhan dapur MBG.

Kami membutuhkan banyak mitra, baik supplier maupun UMKM yang produknya dapat mendukung program MBG. Karena itu kami mengajak berbagai asosiasi di bawah Kadin (IWAPI, GAPEMBI, APJI dan HIPMI) yang memiliki jaringan pelaku usaha dan UMKM, mulai dari sektor perikanan, pangan hingga sektor lain yang terkait,” ujar Desi.

Desi menambahkan bahwa platform tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem distribusi yang lebih terintegrasi, sehingga produk-produk UMKM dapat tersalurkan secara lebih efisien untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

“Kami ingin membangun ekosistem distribusi MBG di bawah Kadin agar rantai pasoknya lebih terhubung dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM di berbagai daerah,” terang Desi. Sementara itu CEO PT Affan Technology Indonesia ([Parto.id](#)) Ikhsan Setia Budi mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Kadin Indonesia melalui Satgas MBG.

“Bagi kami, momentum hari ini bukan sekadar peluncuran sebuah platform digital. Lebih dari itu, hari ini menandai dimulainya sebuah kolaborasi strategis antara ekosistem dunia usaha yang dipimpin oleh Kadin dan teknologi digital yang dikembangkan [Parto.id](#),” pungkas Ikhsan.

KADIN DAERAH:

Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Kaltim 2025-2030 di Ibu Kota Nusantara



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran Pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030 dan jajaran Pengurus Kadin Indonesia yang resmi dilantik pada Senin, 2 Maret 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Samarinda – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) yang dirangkai dengan pengukuhan jajaran pengurus Kadin Provinsi Kaltim masa bakti 2025-2030 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (02/03/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi penyelenggaraan Rapimprov Kadin Kaltim yang berlangsung di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Anin sapaan akrabnya menilai Kadin Indonesia bersama Kadin Kaltim memiliki peran penting dalam mendukung berbagai pembangunan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

“Kadin Indonesia bersama Kadin Kaltim tentu ingin mendukung pembangunan IKN, mengingat masih banyak pembangunan yang akan berjalan, mulai dari parlemen, yudikatif, hingga lanskap, juga tentunya perawatan, dan servis industri yang terkait,” ujar Anin.

Anin juga menyoroti rencana pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Timur yang ditargetkan mencapai kapasitas sekitar 1.700 megawatt (MW) pada 2030. Menurut Anin, hal tersebut membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan industri energi di daerah tersebut.

“Begitu banyak infrastruktur yang akan dibangun (di IKN). Sebagai Ketua Umum Kadin, saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan dan berterima kasih atas komitmen semua pihak dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Timur,” terang Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kaltim Putri Amanda Nurrahmadani menyampaikan bahwa Kaltim memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar sehingga peran Kadin sangat penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Komitmen kami di Kadin adalah mendorong iklim usaha yang inklusif di Kalimantan Timur, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan IKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengukuhan pengurus Kadin Kaltim bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi kekuatan ekonomi daerah di tengah dinamika global.

“Ini momentum strategis. Kadin Kaltim harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk melahirkan entrepreneur yang tidak hanya berstandar lokal, tetapi mampu bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran Pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030 dan jajaran Pengurus Kadin Indonesia yang resmi dilantik pada Senin, 2 Maret 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa pemerintah melalui Otorita IKN berperan dalam penyusunan regulasi dan pembiayaan melalui APBN. Namun, menurutnya, penciptaan lapangan kerja akan banyak didorong oleh peran dunia usaha.

“Dari Otorita, dari APBN itu hanya regulasi dan financing, tapi yang menciptakan lapangan kerja itu adalah Kadin. Jadi saya kira kolaborasi ini harus dilakukan,” ujarnya.

Basuki menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam pembangunan IKN, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan persaingan usaha yang sehat.

“Jadi kalau mau melakukan pekerjaan, kita lakukan seperti aturan yang ada, dengan transparansi dan kompetensi, serta kompetisi. Jadi saya kira semua akan kita lakukan itu,” kata Basuki.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro, WKU Bidang Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari, serta WKU Bidang Pembinaan dan Koordinasi Eksportir Frits Novianto Suhendar.



Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP dan Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi dalam acara Misi Dagang dan Investasi di Menara Peninsula Hotel Jakarta, pada Senin (02/03/2026).

Forum Misi Dagang: Kadin Jatim dan Kadin DKI Jakarta Teken MoU Perdagangan

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar acara Misi Dagang dan Investasi: Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta di Menara Peninsula Hotel Jakarta, pada Senin (02/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kadin Provinsi DKI Jakarta yang mencakup kerja sama di bidang perdagangan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto dan Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto menyampaikan bahwa misi dagang antar-provinsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemanfaatan produk-produk dalam negeri.

“Ini memang dalam rangka memperkuat pasar dalam negeri dengan produk dalam negeri. Ternyata masih banyak sekali peluangnya, sangat besar, baik bagi pengusaha di luar Provinsi Jawa Timur maupun yang ada di Jawa Timur sendiri,” ujar Adik usai acara.

Ia menjelaskan, kerja sama antara Kadin Provinsi Jawa Timur dan Kadin Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha, khususnya dari Jatim, untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada di ibu kota.

“Dengan adanya kerja sama ini kita bisa mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di DKI Jakarta. Ternyata masih banyak kebutuhan yang bisa disuplai oleh Jawa Timur. Harapannya tentu para pengusaha Jawa Timur bisa mendukung kebutuhan tersebut,” kata Adik.

Adik juga berharap model kerja sama serupa dapat dilakukan oleh berbagai provinsi lain sehingga pasar dalam negeri dapat semakin dikuasai oleh produk-produk lokal.

“Harapannya ini bisa dilakukan oleh semua provinsi, sehingga betul-betul pasar dalam negeri bisa dikuasai oleh barang-barang dari dalam negeri juga,” tambahnya.

Selain kerja sama perdagangan, MoU tersebut juga mencakup program pengembangan SDM, termasuk pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Adik, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Menurut kami penentu pertumbuhan ekonomi itu sekitar 60-70 persen ada pada sumber daya manusia. Karena itu perlu terus didorong melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas,” terang Adik.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan misi dagang ini tidak hanya berorientasi pada transaksi komoditas. Ia menyebut kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok yang tangguh dan efisien.

“Kita ingin memastikan apa yang dihasilkan petani, peternak, dan pelaku UMKM di Jawa Timur dapat terserap optimal di pasar Jakarta dengan harga stabil dan kualitas terjaga. Ini adalah upaya bersama untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa bagi DKI Jakarta, misi dagang merupakan instrumen penting untuk memperkuat integrasi pasar dalam negeri. Selain memperpendek rantai pasok, kolaborasi ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional berbasis sinergi antardaerah.

“Bagi DKI Jakarta, misi dagang merupakan instrumen strategis untuk memperkuat integrasi pasar dalam negeri, memperpendek rantai pasok, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional berbasis kolaborasi antar-daerah,” pungkasnya.

Dilansir situs resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, total komitmen transaksi Misi Dagang dan Investasi Jatim-DKI Jakarta, tercatat sebesar Rp5.744.955.800.000, melampaui capaian Misi Dagang Jatim-Jakarta tahun 2021 sebesar Rp750,44 miliar.

Dari total tersebut, nilai penjualan Jawa Timur ke DKI Jakarta mencapai Rp5.615.355.800.000, sedangkan pembelian Jawa Timur dari DKI Jakarta sebesar Rp129.600.000.000 dengan komoditas daging sapi.

Komoditas unggulan Jawa Timur yang ditransaksikan antara lain daging unggas, anak ayam, ternak ayam, biji kopi, fillet dori, aneka olahan seafood dan daging, susu, telur ayam, gula kristal putih, pakan ikan, bantal guling, rokok, produk fashion dan tekstil, saus, kecap, bumbu, batik tulis, kayu gergajian, ikan hias koi dan koki, cerutu, serta domba.

Kadin Lampung Gelar Dialog Ekonomi, Bahas Peluang dan Tantangan Tahun 2026

Bandar Lampung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menggelar acara Dialog Ekonomi Lampung 2026: Peluang dan Tantangan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kadin Lampung, Bandar Lampung pada Senin (09/02/2026).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Lampung Sumita mengatakan bahwa produktivitas sejumlah komoditas unggulan Lampung masih perlu ditingkatkan.

“Seperti kopi Lampung dengan kapasitas 150.000 ton per tahun produktivitasnya perlu ditingkatkan, termasuk lada 40.000 ton per tahun, dengan produktivitas setengah ton per hektar. Dan perlu juga mengembangkan usaha kuliner Lampung,” kata Sumita.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perbankan dan Non-Bank Kadin Provinsi Lampung Irfan Gani yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan dukungan seluruh pihak dalam penyelenggaraan dialog tersebut.

“Kegiatan ini merupakan inisiatif Kadin Lampung untuk memberikan masukan serta kontribusi dalam memperkuat pertumbuhan dan dinamika perekonomian daerah,” kata Irfan.

Menurut Irfan, upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.

Lebih jauh, WKU bidang Kebijakan Fiskal dan publik Kadin Provinsi Lampung Asrian Hendi Cahya menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama dari sektor pertanian, pariwisata, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

“Capaian saat ini menunjukkan ruang pertumbuhan ke depan masih sangat terbuka,” ujar Asrian.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perekonomian August Riko yang mewakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekubang) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa potensi sektor pertanian dan agroindustri di Lampung sangat besar dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kopi.



Foto Bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Lampung bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perekonomian Pemprov Lampung, August Riko (tujuh dari kanan) usai acara Dialog Ekonomi yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Kadin Lampung, Bandar Lampung, pada Senin (09/02/2026).

Namun demikian, menurutnya diperlukan upaya peningkatan nilai tambah dari komoditas tersebut agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

“Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, termasuk potensi produk halal Lampung yang sangat menjanjikan,” ujar August.

August juga menambahkan bahwa sektor primer masih rentan terhadap kondisi cuaca sehingga perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan tol di Lampung dapat meningkatkan akses ekonomi dan memperluas pasar bagi produk-produk daerah.

“Diharapkan dukungan Kadin, asosiasi, serta para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas melalui konsolidasi dan kolaborasi dunia usaha,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung Usep Syaipudin menyampaikan bahwa tingkat inflasi Lampung yang relatif rendah, yakni sekitar 1,9 persen, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, ia menilai peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Indikator makroekonomi belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Lampung Ardiansyah, WKU Bidang Jasa Konsultasi Kadin Provinsi Lampung Safrudin Indrajaya, Ketua Komite Tetap Perlindungan Profesi dan Usaha Kadin Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengembangan Destinasi Wisata dan Event Pariwisata Kadin Provinsi Lampung Endang Prilia dan Wakil Kepala Badan Pengembangan Destinasi Wisata dan Event Pariwisata Kadin Provinsi Lampung Selfia Alke Mega.

APBMI Adukan Kewajiban TKBM untuk Kapal Gearless, Kadin Siap Koordinasi dengan Tiga Kementerian



Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari (dua dari kiri) menerima buku dari perwakilan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto (tiga dari kanan) yang didampingi oleh WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Benny Soetrisno (dua dari kanan), dan WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro (kiri) di Menara Kadin Indonesia pada Rabu (25/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Wilayah Kalimantan menerima audiensi dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (25/02/2026).

Pertemuan tersebut membahas persoalan regulasi kegiatan bongkar muat di Kalimantan Selatan yang dinilai membebani pelaku usaha dan berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional.

Audiensi diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Benny Soetrisno bersama WKU Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari. Delegasi DPP APBMI dipimpin oleh Juswandi Kristanto.

Benny Soetrisno menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan terkait aturan di Kalimantan Selatan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pelaku usaha bongkar muat.

“Dalam konteks penurunan biaya logistik, kebijakan seperti ini tentu bertolak belakang. Teman-teman APBMI meminta Kadin untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti persoalan ini agar dapat diluruskan,” ujar Benny.

Benny menegaskan, Kadin akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kadin juga akan memanggil otoritas pelabuhan untuk membahas dan mengklarifikasi aturan dimaksud agar terdapat kepastian hukum serta keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Senada, WKU Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menegaskan bahwa APBMI merupakan anggota ALB Kadin Indonesia, sehingga aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian serius organisasi.

“Kami akan menyikapi persoalan ini dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai ada regulasi yang justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Jika terdapat aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentu harus dihentikan,” tegas Andi.

Andi menambahkan, Kadin Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan kepastian berusaha kepada pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk sektor bongkar muat, agar dapat berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kadin Indonesia harus memberi jaminan para pelaku usaha, harus berkontribusi aktif dalam memajukan perekonomian di sektor manapun, termasuk sektor bongkar muat yang ada di Indonesia,” terang Andi.

Sementara itu, Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto menjelaskan bahwa persoalan di Kalimantan Selatan berawal dari kewajiban penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk kapal jenis gearless. Padahal, menurutnya, kapal gearless yang telah dilengkapi crane tidak memerlukan pengerahan TKBM dalam proses bongkar muat.

“Kebijakan tersebut jelas meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional. Selain itu, surat edaran yang menjadi dasar kebijakan dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

APBMI lanjut Juswandi meminta Kadin Indonesia untuk membantu meluruskan kebijakan tersebut demi keberlangsungan usaha perusahaan bongkar muat. Selain itu, APBMI juga mendorong adanya lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan guna menciptakan pilihan dan kompetisi yang sehat.

“Kami tidak anti terhadap koperasi TKBM. Namun kami berharap terdapat dua atau tiga koperasi di pelabuhan sehingga ada perbandingan layanan dan biaya yang lebih kompetitif, agar tidak membebani pelaku usaha,” pungkas Juswandi.

Melalui audiensi ini, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjembatani dialog antara pelaku usaha dan pemerintah, serta memastikan regulasi yang diterapkan tetap mendukung efisiensi logistik dan iklim usaha yang sehat di daerah.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.

Kadin Jatim dan Pemprov Jatim Targetkan Terbentuknya Program Vokasi di Seluruh Kabupaten/Kota pada 2026



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto (dua dari kiri) menyaksikan Penandatanganan MoU antara Direktur Kadin Institute yang juga Ketua Pokja 3 TKDV Jatim Nurul Indah Susanti (dua dari kanan) dengan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (23/02/2026).

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim memantapkan penguatan program vokasi dengan menargetkan pembentukan TKDV di seluruh 38 kabupaten/kota rampung pada 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (23/02/2026).

Hingga 2025, sebanyak 22 daerah atau sekitar 60 persen telah membentuk TKDV, sementara 16 kabupaten/kota, termasuk wilayah Madura, kota Surabaya, kota Malang, dan kota Blitar yang masih dalam proses pembentukan.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto menekankan bahwa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas dalam periode kepemimpinan 2025–2030.

“Adik mengingatkan bahwa provinsi Jatim dengan jumlah penduduk 42,09 juta jiwa tengah memasuki momentum bonus demografi.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,61 persen, namun pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi yakni 6,78 persen.

Jika tidak diiringi peningkatan kualitas SDM, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, penguatan kompetensi melalui pelatihan berbasis industri dan sertifikasi profesi menjadi kunci agar tenaga kerja Jawa Timur mampu terserap secara optimal,” tegas Adik.

Adik menambahkan, sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan program. “Sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri menjadi elemen penting agar program tersebut berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur serta kesejahteraan masyarakatnya,” terang Adik.

Sertifikasi Vokasi

Sementara itu, Direktur Kadin Institute yang juga Ketua Pokja 3 TKDV Jatim Nurul Indah Susanti, menjelaskan bahwa arah kebijakan 2026 tidak lagi sebatas sosialisasi dan pembentukan kelembagaan, melainkan implementasi konkret strategi nasional (stranas) ke strategi daerah (strada).

“Sejak 2004 hingga 2025, progres vokasi di Jawa Timur terus bergerak maju meski belum sepenuhnya maksimal. Tahun 2026 kami fokus pada implementasi nyata strada melalui tiga pokja, agar link and match benar-benar berjalan,” ujarnya.

Nurul memaparkan, pada tahap awal terdapat 60 industri yang terlibat dalam program link and match, dengan 16 industri mendapatkan pendampingan intensif melalui konsultan vokasi dan skema in-company training berbasis master trainer.

Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui Pokja 1 (bidang pendidikan) yang mendorong kolaborasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, seperti program industri mengajar, guru magang di industri, serta penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha. Dari total 2.174 SMK di Jatim, baru sekitar 20 persen yang terlibat aktif dalam kerja sama vokasi.

Di dalam TKDV, Pokja 2 (bidang pelatihan) berkoordinasi dengan sekitar 1.750 lembaga pelatihan yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILSI) dan Forum Lembaga Pelatihan Vokasi (Forlat), serta melibatkan unsur Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Di sisi sertifikasi, Pokja 3 mengonsolidasikan sekitar 360-370 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar terintegrasi dengan kebutuhan industri, sekolah, politeknik, dan universitas vokasi. Saat ini tersedia 38 master trainer dan sekitar 700 workplace trainer, namun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kualitas pemagangan.



Foto bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Jawa Timur, Kadin Institute, Pokja 3 TKDV dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (23/02/2026).

Lebih lanjut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Iwan, menegaskan bahwa penguatan vokasi merupakan strategi pembangunan SDM berbasis kebutuhan industri.

“Melalui TKDV yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Tahun 2025 dan diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Strategi Daerah Vokasi, kami mengonsolidasikan pemerintah, pendidikan, dan industri dalam satu kerangka kolaboratif,” Iwan.

Iwan menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang menekankan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai kebutuhan pasar kerja. Secara ekonomi, langkah ini dinilai krusial. Berdasarkan Berita Resmi Statistik 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,85 persen pada April 2025 dan kontribusi 14,22 persen terhadap perekonomian nasional.

Struktur ekonomi didominasi industri pengolahan sebesar 31,32 persen, disusul perdagangan 18,55 persen dan pertanian 10,74 persen.

“Dengan struktur ekonomi seperti ini, kebutuhan tenaga kerja kompeten sangat tinggi. Vokasi menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan dan menekan kemiskinan,” pungkas Iwan.

Di Rapimprov Kadin Jakarta, Anindya Bakrie Jelaskan Tiga Aspek Penting yang Perlu Diwaspadai Indonesia Hadapi Situasi Global yang Tidak Stabil

KADIN DKI JAKARTA RAPIMPROV II

Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tiga dari kiri), Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi (empat dari kanan) dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Jakarta II yang berlangsung di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (09/03/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II dengan tema “Pengusaha Lokal sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta” yang berlangsung di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (09/03/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional.

Menurut Anin sapaan akrabnya, situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

“Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua,” ujar Anin.

Anin menyoroti tiga aspek penting yang perlu diwaspadai Indonesia, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional. Dalam aspek energi, Anin mengingatkan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini, APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih, defisitnya yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40-50 persen,” jelas Anin.

Namun demikian, Anin menyebut kondisi ketahanan energi di DKI Jakarta relatif aman, khususnya untuk pasokan gas dan bahan bakar minyak yang penting bagi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan.

Selain energi, Anin juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum Lebaran.

“Ketua Kadin DKI Jakarta (Diana Dewi) menyampaikan upaya membantu (lewat) pasar murah untuk menekan inflasi. Ini sangat penting karena kita mulai melihat inflasi sedikit demi sedikit merangkak naik, apalagi menjelang periode Lebaran,” kata Anin.

Aspek ketiga lanjut Anin yang ditekankan adalah stabilitas nasional dan stabilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia.

“Kadin DKI Jakarta adalah motor penggerak ekonomi, tetapi juga penjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anin menambahkan bahwa peran Jakarta dalam perekonomian nasional sangat besar, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16,8 persen dari PDB nasional serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen, yang berada di atas rata-rata nasional. “Dan ini terlepas bahwa DKI Jakarta sekarang bukan ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik,” ujar Anin.

Anin juga mengapresiasi langkah Kadin Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembinaan industri kecil menengah (IKM) dan UMKM, terutama melalui program sertifikasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi.

“Nah karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan perekonomian salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas itu serta inovasi tentu sangat erat hubungannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut,” tutur Anin.

Anin juga mengusulkan empat pilar strategis yang dapat menjadi fokus penguatan ekonomi DKI Jakarta.

“Yang pertama bagaimana Kadin DKI Jakarta terus untuk swasembada, syukur-syukur bisa membantu provinsi lain. Nomor dua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga terus menjadi suatu provinsi yang inklusif dan yang terakhir berkelanjutan,” jelas Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa penguatan pengusaha lokal memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah.

Menurutnya, ketika pengusaha lokal tumbuh, dampaknya tidak hanya pada perkembangan bisnis, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta peningkatan penerimaan pajak.

“Ketika pengusaha lokal tumbuh, yang berkembang bukan hanya bisnisnya, tetapi juga lapangan kerja, perputaran ekonomi, dan multiplier effect bagi masyarakat. Seperti ucapan Gubernur agar masyarakat lebih banyak berbelanja di Jakarta dibandingkan di luar negeri. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Setiap rupiah yang dibelanjakan di Jakarta akan kembali berputar di Jakarta,” papar Diana.



Sesi foto bersama jajaran Kadin Indonesia, Kadin DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para peserta Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin DKI Jakarta II, di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (09/03/2026).

Diana juga mengapresiasi para pelaku usaha yang menerapkan kebijakan afirmatif dengan memberikan peluang dan prioritas lebih besar bagi pengusaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan di Jakarta, tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Kami berharap Jakarta juga dapat mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan prioritas bagi pengusaha lokal dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi Jakarta,” kata Diana.

Lebih lanjut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan kota.

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi guna membuka ruang yang lebih luas bagi perkembangan dunia usaha. Dengan demikian, para pengusaha di Jakarta dapat mengembangkan bisnisnya tanpa kekhawatiran terhadap kepastian hukum.

“Pengusaha tidak boleh takut untuk mandiri. Pemerintah DKI Jakarta akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kepastian hukum dalam berbisnis di Jakarta harus menjadi contoh dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global,” pungkas Pramono.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.

Kadin dan Pemprov Sumbar Serahkan 10 Huntau bagi Penyintas Banjir di Batu Busuk Padang



Jajaran Pengurus Kadin Indonesia bersama Pengurus Kadin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar saat peresmian dan penyerahan kunci Hunian Tetap (Huntau) Mandiri Kampung Tangguh Kadin di Batu Busuk, Kecamatan Pauh, provinsi Sumbar pada Selasa (10/03/2026).

Padang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar resmikan sekaligus menyerahkan kunci Hunian Tetap (Huntau) Mandiri Kampung Tangguh Kadin di Batu Busuk, Kecamatan Pauh, provinsi Sumbar pada Selasa (10/03/2026).

Program ini menjadi bentuk kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak pascabencana.

Sebanyak 10 unit huntau dibangun dan diperuntukkan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada akhir tahun lalu.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa pembangunan Huntau tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kadin daerah, hingga perusahaan dan asosiasi dunia usaha yang turut berkontribusi.

Huntau tetap ini lahir dari semangat kolaborasi. Tanpa dukungan pemerintah daerah, Kadin Sumbar, serta berbagai perusahaan dan asosiasi, tentu program ini tidak akan bisa terwujud. Kami berharap model ini dapat menjadi contoh untuk membantu masyarakat terdampak di daerah lain," ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menambahkan, kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan.

"Dengan adanya perang di Timur Tengah sehingga kita butuh justru bergotong royong untuk membuat ekonomi kita sempat bangkit apalagi di daerah yang terdampak," terang Anin.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Sumbar yang telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana di kawasan Kampung Talang Batu Busuk.

Menurutnya, bantuan tersebut memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat. Selain sebagai tempat tinggal yang layak, hunian tetap juga menjadi simbol harapan baru bagi warga untuk kembali menata kehidupan dan masa depan keluarga.

"Semoga hunian tetap ini menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membawa keberkahan bagi masyarakat yang menempatinnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kadin Indonesia dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan hunian permanen bagi warga terdampak bencana tersebut.

"Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia dan seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi membangun hunian tetap ini. Kehadiran huntau ini tentu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Bidang Kerja Sama Pengembangan Profesi SDM Teknik, Industri Kadin Indonesia sekaligus Ketua LPJK Indonesia Insannul Kamil, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumbar Buchari Bachter dan Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Khadafi.



Hadir & Sukseskan

GPM

GERAKAN PANGAN MURAH KADIN SULAWESI TENGGARA

 **KOLAKA**
 **7-8 MARET 2026**



ANDI AMRAN SULAIMAN
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL



ANDI SUMANGERUKKA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. AMRI JAMALUDDIN, S.STP., M.Si
BUPATI KOLAKA SULAWESI TENGGARA



ANINDYA N BAKRIE
KETUA UMUM KADIN INDONESIA



ANTON TIMBANG
KETUA UMUM KADIN SULTRA



ANDI MUH. YUSLIM PATAWARI
WAKIL KETUA UMUM KADIN INDONESIA



KADIN DKI JAKARTA RAPIMPROV II

*Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi
Provinsi DKI Jakarta*



Drs. H. Khoirudin, M.Si
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta



Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta



Anindya Bakrie
Ketua Umum KADIN Indonesia



Diana Dewi
Ketua Umum KADIN DKI Jakarta

Senin 9 Maret 2026	Hotel PARK HYATT Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng - Jakarta	mulai 08.00 s/d 19.00 WIB
-----------------------------------	---	--

KADIN DKI Jakarta @kadindkijakarta @kadindkijakartaid

@kadindkijakarta.id @kadindkijakartaid



DISELENGGARAKAN OLEH:



PELAKSANA:



ICEF
INDONESIA CATALOGUE EXPO AND FORUM



**INDONESIA
PROCUREMENT
FORUM & EXPO**

29 – 31 Juli 2026 JIEXPO Kemayoran

**Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern:
Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas**



HADIRI LAUNCHING

ICEF–IPFE hadir sebagai platform strategis di pasar pengadaan pemerintah serta memperoleh informasi langsung dari LKPP terkait topik pengadaan terkini.

📅 11 Maret 2026 🕒 13:00 WIB

📍 Ruang Roestam Sjarief, lantai 2, Gedung LKPP

TOPIK:

**Seputar Pengadaan dan Potensi untuk
Para Pelaku Usaha**



DIBUKA OLEH:



Anindya N. Bakrie
Ketua Umum Kadin Indonesia



Sarah Sadiqa
Kepala LKPP

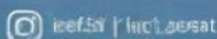


Andi Zabur Rahman
Ketua Umum IAPI

Kontak RSVP Silahkan Hubungi:

Admin Satue
+62 812-8635-1177

Admin 1 DPP IAPI
+62 811 1181 0853



icef.id

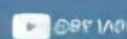


icef.id



icef.id

www.icef-indonesia.com



ICEF IAPI



info@icef-indonesia.id



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka <https://trade.layanankadin.id/>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan



KADIN INDONESIA

Jenis Formulir COO

Form China

Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Preferential Tariff Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.

Form B

Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.

Form B with Notification

Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.

Form ASEAN-India

Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.

Form A

Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.

Form D

Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.

Form Textile Product

Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia

Form Certificate of Export Goods

Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.

Form Certificate of Free Sale

Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950



AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Apa itu ATA CARNET?

- Ata Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.
- Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai Pemberitahuan Pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.
- Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai "Paspor untuk Barang". Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

Siapa Penggunaanya?

Digunakan oleh Pebisnis, Teknisi, Penyelenggara pameran, Profesional, baik perorangan atau tim, Kru Film, Ahli Bedah, Arsitek, Seniman, Insinyur, Peneliti, Entertainer, Grup Musik, Tim Olahraga dll

Jenis-Jenis Barang

Penerapan ATA Carnet dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis;
2. Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli;
3. Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
4. Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
5. Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

Masa berlaku ATA Carnet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang



Persyaratan Penerbitan

- Salinan (copy) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili
- Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili
- Salinan (copy) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin
- Salinan (copy) NPWP Perusahaan/Perorangan
- Salinan (copy) NIB Perusahaan
- Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang
- Rencana Perjalanan Barang
- Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal
- Menandatangani surat pernyataan bermaterai
- Meletakkan Jaminan



Kontak Pengajuan ATA Carnet

Email: atacarnet.idn@kadin.id atau atacarnetindonesia@gmail.com
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com

AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Negara-negara yang menerbitkan dan menerima ATA Carnet untuk keperluan ekspor dan impor sementara :

- | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 21. Estonia | 41. Lebanon | 61. Qatar |
| 2. Amerika Serikat | 22. Finlandia | 42. Lithuania | 62. Republik Ceko |
| 3. Albania | 23. Filipina | 43. Luxemburg | 63. Rumania |
| 4. Algeria | 24. Gibraltar | 44. Makau | 64. Rusia |
| 5. Andorra | 25. Hongkong | 45. Madagaskar | 65. Selandia Baru |
| 6. Arab Saudi | 26. Hungaria | 46. Malaysia | 66. Senegal |
| 7. Australia | 27. India | 47. Malta | 67. Serbia |
| 8. Austria | 28. Indonesia | 48. Maroko | 68. Singapura |
| 9. Bahrain | 29. Inggris | 49. Mauritius | 69. Slovakia |
| 10. Belanda | 30. Iran | 50. Makedonia Utara | 70. Slovenia |
| 11. Belarus | 31. Irlandia | 51. Meksiko | 71. Spanyol |
| 12. Belgia | 32. Islandia | 52. Moldova | 72. Sri Lanka |
| 13. Bosnia Herzegovina | 33. Israel | 53. Mongolia | 73. Swedia |
| 14. Bulgaria | 34. Italia | 54. Montenegro | 74. Swiss |
| 15. Chili | 35. Jepang | 55. Norwegia | 75. Thailand |
| 16. China | 36. Jerman | 56. Pakistan | 76. Tunisia |
| 17. Côte d'Ivoire | 37. Kanada | 57. Perancis | 77. Turki |
| 18. Kroasia | 38. Kazakhstan | 58. Peru | 78. Ukraina |
| 19. Cyprus | 39. Korea | 59. Polandia | 79. Uni Emirat Arab |
| 20. Denmark | 40. Latvia | 60. Portugal | 80. Vietnam |
| | | | 81. Yunani |

Masa berlaku ATA Canet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com



Kontak Pengajuan ATA Carnet

Email: atacarnet.idn@kadin.id atau atacarnetindonesia@gmail.com
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".



Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

[Akses Situs Resmi](https://kadin.id/keanggotaan)

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka anggota.kadinindonesia.id

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

6

Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

3

Isi Data Perusahaan/ Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

7

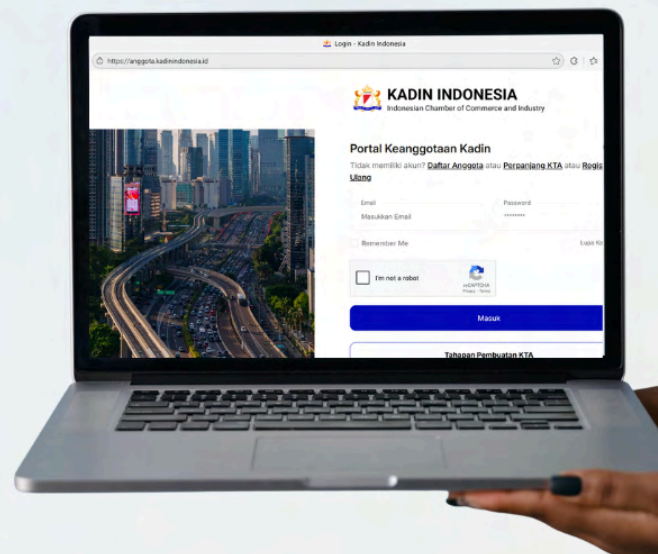
Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda



KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



- KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda
- Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**
- Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin memenuhi **kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**
- KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**
- KTA dan SBU Kadin menunjukkan **standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id